

December 2014

Efektivitas Penggunaan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) dalam Strategi Kontra-Terrorisme Amerika Serikat di Pakistan (2004-2012)

Egalita Irfan

Department of International Relations, University of Indonesia, egalita.irfan@ui.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/global>

Recommended Citation

Irfan, Egalita (2014) "Efektivitas Penggunaan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) dalam Strategi Kontra-Terrorisme Amerika Serikat di Pakistan (2004-2012)," *Global: Jurnal Politik Internasional*: Vol. 16 : No. 2 , Article 6.

DOI: 10.7454/global.v16i2.12

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/global/vol16/iss2/6>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Social and Political Sciences at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Global: Jurnal Politik Internasional* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN *UNMANNED AERIAL VEHICLE* (UAV)
DALAM STRATEGI KONTRA-TERRORISME AMERIKA SERIKAT DI
PAKISTAN (2004-2012)**

Egalita Irfan¹

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia

Email: egallita.irfan@ui.ac.id

Abstrak

Unmanned Aerial Vehicle (UAV) is an armed unmanned plane, which is also one of the most advanced technologies developed by the United States. UAV is more superior compared with other kinds of weapon. Currently, it is used in many parts of the world as a part of the United States' counter-terrorism measure. However, the use of UAV in Pakistan since 2004 to 2012 does not successfully reduce the number of terrorist attack that happens on that country. This research aims to figure out the reasons behind this failure through the use of congruence in retrospective. The results show that the failure of UAV relies upon 3 factors: (1) US did not really understand the characteristic of targeted terrorist organizations, (2) there is a mistake in the decision making based on the intelligence cycle, and (3) the nonexistent of local society's support.

Kata Kunci

UAV, counter-terrorism, Pakistan, United States, war on terror, Taliban and Al Qaeda

Pendahuluan

Dewasa ini, studi Keamanan Internasional sudah berkembang tidak lagi hanya mencakup masalah militer dan hubungan antar-bangsa tetapi juga membahas bagaimana aktor non-negara dapat menjadi sumber ancaman yang besar bagi eksistensi negara. Salah satu isu dalam studi Keamanan Internasional yang semakin signifikan adalah terorisme. Serangan ke *World Trade Center* pada 11 September 2001 menjadikan terorisme sebagai salah satu prioritas utama bagi pemerintah negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat (AS). Sebelum serangan tersebut, sebagian besar negara tidak menyangka bahwa aktor non-negara seperti organisasi teror dapat menimbulkan ancaman yang besar terhadap keamanan. AS yang dianggap sebagai negara terbesar dengan tingkat keamanan yang paling tinggi di dunia ternyata bisa dengan mudah diserang oleh kelompok teror yang tadinya tidak dianggap signifikan. Karena dampaknya sangat destruktif terhadap berbagai sektor negara, upaya-upaya

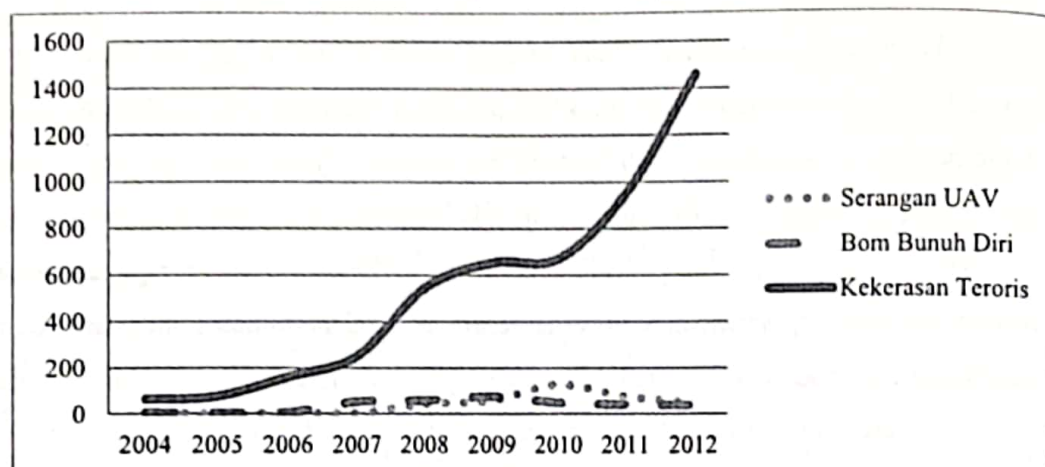
untuk menghentikan tindak terorisme telah dilakukan oleh pemerintah-pemerintah di seluruh dunia.

Terorisme dapat didefinisikan sebagai ancaman dan penggunaan kekerasan, baik dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk menciptakan efek ketakutan atas kelompok yang jumlahnya lebih besar daripada pihak yang menjadi target untuk diserang. Tujuannya adalah untuk memaksa kelompok tersebut untuk mendengarkan dan melakukan apa yang menjadi tuntutan pelaku.² *War on Terror* merupakan bentuk respon AS terhadap serangan 9/11 yang secara esensial bertujuan untuk melindungi kebebasan dan keselamatan warga AS serta masyarakat dunia dengan cara menemukan dan menghancurkan kelompok teroris secara global. Di samping itu, tujuan strategis *War on Terror* adalah untuk menciptakan lingkungan internasional yang tidak memungkinkan beroperasinya kelompok teror beserta aliansi-aliansinya.³

Untuk mencapai tujuan-tujuan di atas, penggunaan UAV menjadi salah satu taktik yang dipilih AS dalam strategi kontra-terorisme untuk memberantas kelompok militan dan teror dalam operasi *War on Terror*. UAV yang juga dikenal sebagai *drones* merupakan kendaraan udara yang dapat diterbangkan tanpa pilot dan menyesuaikan sendiri jalur penerbangannya. Pada awalnya, UAV lebih banyak digunakan dalam pengumpulan data dan mata-mata,⁴ namun saat ini UAV juga digunakan sebagai salah satu bagian dari strategi ofensif dalam mengeliminasi teroris dengan cara melancarkan serangan udara. Penggunaan UAV yang juga merupakan bentuk *extrajudicial killing* merupakan strategi utama yang digunakan dalam *War on Terror* di Pakistan karena dianggap dapat secara langsung menangani permasalahan terorisme.

Terlepas dari kenyataan bahwa UAV dianggap sebagai senjata mutakhir yang efektif dalam membunuh teroris, efektivitas penggunaan taktik tersebut dipertanyakan. Sejak UAV pertama kali digunakan di Pakistan pada tahun 2004, serangan kelompok militan kepada, baik tentara AS maupun masyarakat sipil, bukannya berkurang melainkan cenderung bertambah.⁵ Pada tahun 2010, ketika AS melipatgandakan jumlah serangan UAV di Pakistan dari 57 menjadi 128, kekerasan yang dilakukan kelompok teror juga naik menjadi 675. Pada tahun berikutnya, serangan teror kembali naik secara signifikan menjadi 959 serangan.⁶ Fakta ini tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan, padahal UAV telah secara substansial mengeliminasi orang-orang penting di balik berbagai serangan yang terjadi baik di dalam maupun di luar Pakistan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi AS dalam menghadapi kelompok militan dengan menggunakan UAV di Pakistan memiliki masalah.

Grafik I. Perbandingan Serangan UAV AS dengan Aksi Teror di Pakistan



Diolah kembali dari: "South Asia Terrorism Portal," dalam *Pakistan Data Sheets* diakses dari <http://www.satp.org/satporgtp/countries/pakistan/database/index.html>

Penelitian ini membahas dampak dan masalah dari penggunaan UAV di Pakistan sebagai bagian dari *War on Terror*. Pertanyaan permasalahan yang diajukan ada dua. Pertama, bagaimana efektivitas penggunaan UAV dalam strategi kontra-terorisme AS di Pakistan pada periode 2004-2012? Kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas tersebut? Tahun 2004 menjadi awal penelitian karena tahun tersebut merupakan awal di mana AS mulai menggunakan UAV di Pakistan, sedangkan tahun 2012 dipilih karena merupakan tahun terakhir di mana data mengenai UAV bisa diakses. Tujuan dari penelitian ini adalah memahami kekuatan dan kelemahan *extrajudicial killing*, dalam konteks ini adalah UAV, sebagai salah satu taktik dalam strategi kontra-terorisme di Pakistan.

Tinjauan Teoritis

Pemimpin organisasi teror secara esensial merupakan nyawa dari kelompoknya. Pergantian pemimpin merupakan sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Pada umumnya, organisasi teror yang berbasis persamaan ideologi menginginkan pemimpin yang memiliki pemahaman yang tinggi terhadap ideologi yang dipercaya. Karena posisinya yang sentral dan sulit untuk digantikan, penangkapan atau pembunuhan pimpinan kelompok teror dapat secara substansial mengurangi kemampuan kelompok tersebut untuk melakukan penyerangan.⁷

Menurut Daniel Byman, ada 3 hal yang membuat taktik *extrajudicial killing* berhasil. Kesuksesan taktik ini bergantung kepada karakteristik kelompok teror yang

ditargetkan, terkumpulnya informasi intelijen yang transparan dan kredibel sebelum menentukan target serangan, dan penggunaan *extrajudicial killing* sebagai usaha terakhir sesuai dengan prinsip internasional.

1. Karakteristik kelompok teror: hirarkis dan bertujuan politis

Kesuksesan *extrajudicial killing* sebagai salah satu taktik dalam kontra-terorisme sangat bergantung kepada karakteristik kelompok teror yang akan ditargetkan. Kelompok teror yang berbeda membutuhkan penanganan yang berbeda pula. Menurut Byman, kelompok teror yang kepemimpinannya tersentralisasi lebih mudah untuk hancur ketika diserang dengan *targeted killing*, termasuk dengan UAV, karena kepemimpinan kelompoknya sulit untuk digantikan.⁸ Pada kelompok yang demikian, pemimpin biasanya juga merupakan ahli strategi dan perencana serangan teror, sekaligus simbol bagi perjuangan kelompoknya. Pendapat ini didukung oleh Johnston, dimana dikatakan bahwa kelompok yang usianya relatif lebih muda juga lebih mudah untuk dikalahkan.⁹

2. Prosedur dan informasi intelijen yang kredibel

Taktik *extrajudicial killing*, termasuk dalam konteks UAV, membutuhkan begitu banyak informasi yang kredibel untuk menentukan target, waktu, dan tempat serangan.¹⁰ Oleh karena itu, untuk menciptakan operasi yang berhasil, pihak yang akan menjalankan operasi harus benar-benar memiliki informasi yang kredibel sehingga target yang diserang benar-benar akurat yang dalam konteks kelompok teror biasanya adalah para pemimpinnya.¹¹ Informasi tersebut kemudian harus diolah secara kredibel dan transparan untuk menentukan apakah target benar-benar pantas untuk dibunuh. Hal ini diperlukan untuk mencegah adanya dampak buruk, misalnya jatuhnya korban dari masyarakat sipil. Kredibilitas informasi dan pembuatan keputusan dapat dilihat berdasarkan *intelligence cycle* yang merupakan siklus yang digunakan oleh instansi-instansi intelijen di AS dalam pembuatan kebijakan.

3. Mendapatkan dukungan masyarakat lokal dan internasional

Extrajudicial killing memang merupakan taktik yang kontroversial karena langsung menargetkan anggota kelompok teror yang bukan militer sehingga dapat dikategorikan sebagai masyarakat sipil. Untuk menjadikan *extrajudicial killing* berhasil, dibutuhkan dukungan masyarakat internasional dan juga masyarakat lokal agar taktik ini terus bisa dilaksanakan. Taktik ini sebaiknya

dijadikan upaya terakhir ketika negara tempat *extrajudicial killing* dianggap tidak bisa menangani sendiri masalah terorismenya.¹² Byman juga menyatakan bahwa prosedur *extrajudicial killing* sebaiknya memiliki beberapa standar operasi yang dijalankan.¹³

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berbagai data dikumpulkan dan kemudian dilakukan analisis mengenai berbagai kemungkinan jawaban bagi pertanyaan yang diajukan. Penelitian kualitatif lebih bertujuan untuk memahami secara mendalam sebuah fakta dan menjelaskannya dalam bentuk analisis dan hubungan sebab akibat (eksplanasi) sehingga akhirnya mendapatkan suatu penemuan atau pemahaman baru. Studi kasus dalam penelitian ini menggunakan metode *congruence* dimana jawaban pertanyaan permasalahan didapatkan dari melihat kecocokan antara hubungan kausal dalam teori. Variabel-variabel yang ada dalam *extrajudicial killing* akan dicocokkan dengan elemen-elemen dalam kasus kemudian akan dilihat lebih lanjut signifikansi hubungan kausalnya.¹⁴ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan. Data primer yang digunakan akan berasal dari pidato-pidato yang disampaikan pemerintah AS, termasuk Presiden, sementara data sekunder yang digunakan merupakan data yang didapatkan dari media internasional seperti BBC, *Amnesty International*, TIME, dan literatur-literatur yang relevan dengan apa yang dikaji dalam penelitian ini. Selain data kualitatif, data kuantitatif juga akan dibutuhkan terutama dalam bentuk data statistik untuk mengamati jumlah serangan UAV setiap tahunnya yang nanti dibandingkan dengan jumlah serangan teror di Pakistan. Data akan dicari pada literatur yang bersifat fisik berupa buku dan yang bersifat digital seperti berita di internet, *e-book*, dan jurnal ilmiah yang dapat diakses.

Perlu dicatat bahwa data mengenai statistik serangan UAV tidak dapat dipastikan 100%. Pemerintah AS tidak pernah mengeluarkan pengumuman resmi mengenai jumlah serangan UAV yang mereka lakukan dan mereka juga tidak mengeluarkan data rincian berapa orang dan siapa saja orang yang tewas karena serangan tersebut. Untuk kepentingan penelitian, *cross reference* dilakukan dengan beberapa sumber media lokal dan internasional terpercaya untuk mengestimasi jumlah serangan UAV di Pakistan dan juga jumlah serangan teror yang terjadi di negara tersebut.

Hasil Penelitian

Dalam menganalisis alasan kegagalan penggunaan UAV AS di Pakistan pada periode 2004-2012, ditemukan beberapa faktor yang berpengaruh. Pertama, karakteristik kelompok teror di Pakistan yang menjadi target penyerangan UAV adalah non-hirarkis dan ideologis sehingga apabila ada individu yang tewas dengan serangan UAV masih ada orang lain yang memiliki pengetahuan dengan tingkat yang sama di jejaring organisasi tersebut yang bisa menggantikan posisi individu yang diserang. Bukan hanya itu, ketidakberhasilan penggunaan UAV di Pakistan juga terjadi karena basis kelompok-kelompok teror adalah nilai-nilai Islam dengan semangat jihad sehingga tewasnya anggota kelompok tidak bisa mengurangi semangat anggota lainnya dalam melawan AS.

Variabel kedua yang mempengaruhi ketidakberhasilan penggunaan UAV di Pakistan adalah prosedur dan informasi intelijen yang digunakan tidak kredibel, dilihat dari *intelligence cycle*. Proses *production and analysis* dalam siklus tersebut pada dasarnya menggunakan parameter yang digunakan dalam konsep *signature strike* untuk menentukan target serangan UAV, dimana orang yang dianggap memiliki pola perilaku dan interaksi seperti anggota kelompok teror merupakan target yang sah. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai legalitas serangan UAV dan keraguan mengenai apakah target serangan memang merupakan anggota kelompok teror atau hanya masyarakat sipil. Karena proses intelijennya yang tidak kredibel, terjadi efek bumerang kontra-terorisme dalam bentuk radikalisasi masyarakat yang mendorong bertambahnya jumlah anggota kelompok teror dari masyarakat sipil yang dendam kepada AS.

Variabel terakhir yang diteliti adalah dukungan masyarakat lokal dan internasional. Penggunaan UAV di Pakistan dilihat oleh masyarakat lokal sebagai pelanggaran kedaulatan negara. Sejak UAV digunakan pada tahun 2004, prosentase masyarakat Pakistan yang menganggap AS sebagai musuh semakin meningkat. Pada sisi lain, prosentase masyarakat Pakistan yang ingin melawan kelompok teror menggunakan militer semakin berkurang tiap tahunnya. Variabel ketiga ini juga dapat berujung kepada radikalisasi masyarakat Pakistan dan mendorong dukungan kepada kelompok-kelompok teror yang bisa menyebarkan propaganda anti-AS. Hal ini menjadikan penggunaan UAV kontra-produktif terhadap kepentingan AS dalam kontra-terorisme di Pakistan. Dari penjelasan di atas, variabel kedua dan ketiga yang

digunakan dalam penelitian ini berhubungan secara tidak langsung karena dampak nyata dari kedua variabel tersebut terjadi kepada masyarakat yaitu terjadinya radikalisasi.

Pembahasan

Karakteristik Kelompok Teror

Taliban dan Al Qaeda memiliki usia yang cukup tua. Al Qaeda telah dibentuk sejak puluhan tahun yang lalu. Pada dasarnya, ideologi, dan kepemimpinan Al Qaeda dan Taliban memiliki banyak perbedaan. Kehidupan para pemimpin Al Qaeda, dimana tidak seorangpun berasal dari Afghanistan, dapat dilihat dari pembangunan politik di Timur Tengah. Pergerakan Al Qaeda biasanya merupakan bentuk respon terhadap kejadian di kawasannya dan berbasis kepada ideologi-ideologi Arabisme, seperti Sayyid Qutb pada tahun 1960-an.¹⁵ Ketika itu, orang-orang yang kelak akan menjadi bagian penting dari Taliban masih sangat muda dan tumbuh di daerah pinggiran bagian selatan Afghanistan. Sebagian besar dari mereka bahkan terisolasi dari perkembangan politik Islam, sementara masyarakat Arab terekspos terhadap informasi-informasi tersebut.¹⁶

Pada *Operation Enduring Freedom*, diperkirakan 8 hingga 12 ribu anggota Taliban Afghanistan tewas atau secara kasar sekitar 20% dari pasukan organisasi tersebut dengan dua kali lipat jumlah yang disebutkan sebelumnya terluka dan hingga 7.000 anggota tertangkap.¹⁷ Dengan kondisi yang demikian, dapat dikatakan bahwa Taliban di Afghanistan ketika itu mengalami kehilangan yang luar biasa besar meski masih tetap bernafas. Karena intervensi AS, banyak anggota kelompok tersebut yang mencari perlindungan ke Pakistan.

Terjadi perdebatan di antara para peneliti dan akademisi mengenai struktur kepemimpinan organisasi Al Qaeda. Osama bin Laden selama bertahun-tahun menjadi orang yang paling dicari di dunia karena dipercaya sebagai aktor yang memiliki peran sentral dalam setiap pergerakan Al Qaeda.¹⁸ Secara formal, Al Qaeda memiliki hirarki dan berbagai posisi.¹⁹ Meskipun demikian, struktur yang tadinya hirarki ini semakin berkembang dan kini bentuknya lebih terdesentralisasi.²⁰ Dengan tidak signifikannya otoritas pemerintahan di Pakistan yang diiringi dengan instabilitas di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, jaringan Al Qaeda menjadi lebih mandiri secara operasional dari pusat kepemimpinan organisasinya.²¹ Kepemimpinan tidak hanya tersentralisasi pada satu individu melainkan anggota kelompok saling berhubungan dan beberapa

individu tertentu memegang kendali. Jaringan-jaringan ini semakin berkembang dan beberapa cenderung fokus kepada tujuan-tujuan regional dan lokal.²² Sistem desentralisasi kepemimpinan ini menjelaskan mengapa meskipun para pimpinan Al Qaeda telah ditangkap dan dibunuh, kehilangan tersebut tidak memberikan dampak kepada Al Qaeda dalam jangka panjang.

Dapat dilihat misalnya dalam kasus pergantian kepemimpinan di tubuh organisasi tersebut sangat lazim terjadi. Orang nomor 3 di Al Qaeda sudah digantikan sebanyak 7 kali dan setiap kali pemegang posisi tewas sudah ada orang yang dipersiapkan untuk menggantikannya. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi awal AS yang menyatakan bahwa Al Qaeda dan organisasi teror lainnya cenderung berbentuk hirarki dengan sentralisasi pemimpin tidak terbukti. Kenyataan bahwa pengganti posisi bisa dipilih dengan mudah menunjukkan adanya distribusi pengetahuan dan kemampuan di antara para kader organisasi sehingga informasi dan strategi bukan lagi menjadi sesuatu yang sangat eksklusif. Semakin digunakannya taktik *extrajudicial killing* di Pakistan, organisasi-organisasi ini semakin menunjukkan bahwa bentuk organisasi jejaring lebih mampu bertahan hidup dalam menghadapi berbagai strategi AS. Selain berbentuk jejaring secara internal organisasi, kelompok-kelompok ini juga memiliki hubungan yang dekat satu sama lain karena adanya kesamaan kepentingan (*common interest*) mereka bisa saling berkomunikasi dan bahkan melakukan pelatihan militer bersama-sama sebagaimana yang dilakukan oleh TTP dan *Haqqani Network*.

Selain bentuk kepemimpinan yang berupa jaringan dan terdesentralisasi, para anggota kelompok merupakan aktor yang penting untuk diperhatikan dalam pergerakan kelompok teror. Manakala para pengikut kelompok, dengan menggunakan konsep jihad sebagai basis perjuangan anggota kelompok teror, kehilangan pimpinan, hal tersebut tidak menjadi masalah utama karena perjuangan akan tetap berlanjut terlepas dari apapun yang terjadi. Di samping itu, hal ini juga menjelaskan bagaimana UAV tidak akan menjadi *deterrence* yang signifikan karena banyak anggota dari kelompok teror tersebut percaya bahwa mati dalam melawan AS merupakan sesuatu yang membanggakan sebagai bagian dari jihad. Hal inilah yang menyebabkan *deterrence* yang ditawarkan taktik *extrajudicial killing* melalui UAV tidak berhasil di Pakistan.

Prosedur dan Informasi Intelijen yang Kredibel

Intelijen pada dasarnya merupakan suatu pengetahuan yang didapatkan melalui proses integrasi logis dan penilaian akan sesuatu informasi yang cukup kuat bagi penegak hukum untuk menarik kesimpulan mengenai suatu kejadian atau kejahatan.²³ Informasi merupakan nilai sentral dalam intelijen. Dalam pengambilan keputusan di badan intelijen, dikenal istilah *intelligence cycle*, yang merupakan proses di mana informasi didapatkan, diubah menjadi informasi intelijen, dan diberikan kepada pembuat kebijakan.²⁴ *Intelligence cycle* memiliki lima tahapan, yaitu perencanaan dan pengarahan (*planning and direction*), pengumpulan (*collection*), pemrosesan (*processing*), produksi dan analisis (*production and analysis*), dan penyampaian informasi (*dissemination*). Untuk mencapai suatu keputusan intelijen yang dianggap kredibel, informasi harus diolah melalui kelima proses ini.

Planning and direction dalam konteks UAV di Pakistan dilakukan sejak awal ketika AS mengetahui bahwa Pakistan merupakan negara yang menjadi basis bagi berbagai kelompok teror, termasuk organisasi yang paling dicari AS setelah 9/11, yaitu Al Qaeda. Osama bin Laden mengklaim bahwa pihak Al Qaeda adalah organisasi yang bertanggung jawab atas serangan kepada *World Trade Center* tersebut dan dari situlah CIA dan agensi lainnya membangun analisis hubungan antara organisasi teror yang berbasis di Timur Tengah. Informasi yang didapatkan sebelumnya juga mencakup bagaimana Pakistan karena pemerintahannya cenderung tidak ketat dalam menegakkan peraturan bahkan sebelum bekerjasama dengan AS dalam *War on Terror* dianggap sebagai negara yang mendukung kegiatan terorisme (*state-sponsored terrorism*) dan menjadi *safe haven* bagi Al Qaeda. Oleh karena itu, AS merasa bahwa harus ada tindakan yang pasti dalam menghadapi sumber ancaman yang potensial tersebut.

Tahapan kedua yang dilakukan dalam siklus adalah *collection*, yaitu: proses mengumpulkan informasi mentah yang diperlukan untuk menghasilkan intelijen akhir. Sumber informasi bisa berasal dari sumber yang terbuka misalnya koran, buku, siaran asing, wawancara, dan sebagainya. Di samping sumber terbuka, informasi juga bisa didapatkan melalui agen yang ditempatkan di luar negeri, penyadap, dan menggunakan detektor yang berfungsi untuk memberikan informasi yang tidak bisa didapatkan dengan menggunakan cara lain. Sebagian besar informasi yang didapatkan oleh AS dalam penyerangan kelompok teror menggunakan UAV di Pakistan berasal dari penggunaan UAV non-ofensif yang bertugas untuk mengumpulkan informasi dari udara.²⁵ Dengan taktik ini, pergerakan, kebiasaan, pola perilaku, dan interaksi individu yang dicurigai bisa diamati secara jelas. Informasi yang didapatkan dari tinjauan UAV

non-ofensif dapat dianalisis oleh para agen untuk menentukan tindakan apa yang sebaiknya diambil berikutnya.

Processing melibatkan perubahan informasi dalam jumlah besar menjadi bentuk yang bisa digunakan oleh analis. Hal ini dilakukan melalui berbagai metode, termasuk dengan cara mendekripsikan kode, menterjemahkan, dan mengeliminasi data. *Processing* juga termasuk proses memasukkan data ke dalam *database* dimana informasi tersebut bisa diekstrak untuk digunakan pada proses analisis. Dalam konteks UAV di Pakistan, CIA melakukan eliminasi mengenai informasi yang dianggap relevan untuk dijadikan basis analisis keberadaan kelompok teror. Produk yang dihasilkan dari *processing* ini adalah *disposition matrix* yang merupakan *database* tunggal yang terus berkembang di mana biografi, lokasi, asosiasi, dan afiliasi berbagai organisasi teror dijadikan suatu katalog.²⁶ *Database* ini dijadikan instrumen untuk memetakan opsi operasional yang merinci peran masing-masing instansi apabila sewaktu-waktu ada serangan atau kejadian yang tidak terduga dalam kontra-terorisme.²⁷

Production and analysis adalah proses keempat, dimana biro yang memiliki informasi melihat dengan lebih detail dan memutuskan bagaimana informasi-informasi tersebut berkaitan satu sama lain untuk mengubahnya menjadi informasi intelijen. Proses ini mencakup integrasi, evaluasi, validasi data, dan menentukan relevansi serta signifikansi. Informasi-informasi ini diintegrasikan secara rasional, dimasukkan ke konteks tertentu, dan digunakan untuk menghasilkan informasi intelijen.²⁸ Analisis dalam organisasi intelijen harus berupaya untuk memisahkan data yang bisa digunakan dan mengubahnya menjadi informasi yang kredibel. Dalam penggunaan UAV di Pakistan, validasi data yang merupakan juga ajang pembuktian hipotesis dilakukan dalam beberapa bentuk, salah satunya melalui *National Counterterrorism Center* (NCTC) akan mempersiapkan daftar target potensial yang akan ditinjau setiap tiga bulan oleh panel yang berisi analis intelijen dan aparat militer. Kemudian, daftar tersebut akan diberikan kepada panel lainnya di *National Security Council* (NSC) yang berhubungan dengan CIA.²⁹

Sementara itu, proses terakhir dalam *intelligence cycle* adalah *dissemination* atau proses distribusi produk intelijen kepada pihak yang menginisiasi *requirement* intelijen. Setelah membaca analisis final mengenai pertanyaan awal, pembuat kebijakan nantinya bisa kembali dengan pertanyaan lain dan siklus intelijen diulang kembali dari awal.³⁰ Perlu diingat, khusus dalam konteks UAV di Pakistan, pihak yang

melakukan *intelligence cycle* juga berperan dalam menentukan tindak lanjut atas data tersebut sehingga proses *production and analysis* dan *dissemination* tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Wewenang untuk menentukan penggunaan UAV di Pakistan dipegang oleh Direktur CIA.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bagaimana dalam *intelligence cycle* CIA tidak memiliki masalah dalam tiga proses, yaitu: *planning and direction*, *collection*, dan *processing*. Dengan adanya berbagai teknologi yang canggih dan koordinasi dengan agensi pemerintah lainnya, pengumpulan data dalam proses *collection* tidak menjadi sebuah isu bagi CIA. Dalam *processing*, CIA juga memiliki banyak sumber daya manusia yang bisa digunakan untuk membuat *disposition matrix* yang merupakan kompilasi data mengenai individu dan pergerakan kelompok teror. Namun, proses yang dilakukan dalam tahap *production and analysis* tidak kredibel karena adanya pelanggaran terhadap konsep *presumption and innocence* yang bisa dilihat dari dilakukannya *signature strike* menggunakan UAV. Pemilihan target berdasarkan pola perilaku dan interaksi saja tidak cukup untuk semerta-merta memberikan hukuman mati kepada individu tersebut melalui UAV tanpa adanya proses peradilan yang transparan. Selain itu, proses *dissemination* juga bermasalah. CIA sebagai pihak yang melakukan *intelligence cycle* juga merupakan badan yang mengambil keputusan akan eksekusi serangan UAV kepada individu-individu yang terpilih. Padahal, serangan UAV dikategorikan sebagai senjata militer dan seharusnya dioperasikan oleh militer yang bertanggung jawab dan berkewajiban untuk patuh kepada *Geneva Convention*, yang melindungi hak-hak masyarakat sipil di kondisi perang.

Production and analysis dan *dissemination* yang tidak kredibel ini potensial untuk berujung pada radikalisasi masyarakat Pakistan. Hal ini juga dikenal sebagai efek bumerang kontra-terorisme.³¹ Masyarakat sipil yang menyaksikan bagaimana anggota keluarganya tewas terbunuh akan menjadi lebih rentan untuk terkena propaganda jihad kelompok teror. Hal ini juga akan berkontribusi kepada kuantitas jumlah anggota kelompok teror yang bisa melakukan serangan, misalnya bom bunuh diri. Oleh karena itu, dalam pembuatan keputusan akan serangan UAV di Pakistan, pembuatan keputusan tersebut hendaknya dilakukan dengan ekstra hati-hati karena sensitivitas isu dan adanya sentimen anti-Amerika di negara tersebut. Namun, berdasarkan pemaparan di atas, penggunaan *signature strike* yang pada dasarnya tidak transparan, menjadi kontra produktif. Hal ini menunjukkan bagaimana prosedur dan

informasi intelijen yang tidak kredibel berpengaruh kepada efektivitas penggunaan UAV sebagai upaya kontra-terorisme AS di Pakistan.

Dukungan dari Masyarakat Lokal dan Internasional

Dukungan dari masyarakat dan pemerintah lokal merupakan sesuatu yang sangat esensial dalam memenangkan *War on Terror* di negara di mana AS melakukan upaya kontra-terorisinya. Untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat lokal, bentuk intervensi seperti apapun hanya bisa dilakukan sebagai langkah terakhir atau *last resort*. Dengan kata lain, taktik UAV sebagai bentuk *extrajudicial killing* hanya akan bisa berhasil apabila dilaksanakan sebagai upaya terakhir setelah taktik lain tidak berhasil. Dalam kondisi yang demikian, diasumsikan bahwa masyarakat dan pemerintah lokal tempat taktik *extrajudicial killing* dilakukan memang telah tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memberikan perlindungan.

Harus diakui, pemerintah Pakistan telah memunculkan berbagai pernyataan publik yang mengutuk penggunaan UAV untuk membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai teroris di Pakistan.³² Namun, selain memberikan pernyataan, pemerintah Pakistan tidak melakukan hal-hal lain yang lebih substansial. Sementara itu, korban dari masyarakat sipil Pakistan terus bertambah dan bahkan jumlahnya meningkat tiap tahunnya.³³ Absennya tindakan dari Pakistan untuk menghentikan AS menjadi lebih problematik karena sejak awal pemerintah Pakistan memang tidak melabeli semua suku sebagai kelompok teror. Masyarakat Pakistan pun terus membangun opini publik yang negatif terhadap AS akibat penggunaan UAV di Pakistan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Pew Research Center* pada tahun 2012, 3 dari 4 orang masyarakat Pakistan atau sekitar 74% menganggap AS sebagai musuh, jumlah yang naik dari tahun sebelumnya yaitu 64%.³⁴ Selain itu, pada tahun 2012 hanya 13% masyarakat Pakistan yang menganggap bahwa hubungan Pakistan dan AS semakin membaik dan hanya 17% mendukung penggunaan UAV AS yang menargetkan pemimpin kelompok militan. Publik Pakistan juga semakin tidak berkeinginan untuk menggunakan militernya sendiri untuk melawan kelompok militan. Pada tahun 2009, 53% masyarakat mendukung pemerintah untuk melawan kelompok militan di FATA dan Khyber Pakhtunkhwa, namun pada tahun 2012 jumlah tersebut berkurang menjadi hanya 32%.³⁵

Sementara itu, secara esensial, intervensi militer disetujui sebagai konsep yang hanya bisa dilakukan sebagai upaya terakhir atau *last resort*. Penggunaan taktik

extrajudicial killing AS menggunakan UAV membutuhkan dukungan masyarakat internasional secara luas untuk mendapatkan legitimasi. Selama ini, AS selalu berusaha berargumen bahwa alasan mengapa ia menggunakan UAV di Pakistan adalah karena tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh untuk menangani kelompok teror di Pakistan sebagai *self-defense* dan pemerintah Pakistan tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi masyarakatnya dari serangan teror sehingga AS harus masuk dan melaksanakan kewajiban tersebut.

Sebagai negara yang selalu mengagung-agungkan ditegakkannya kemanusiaan, AS jelas memiliki standar ganda dalam mengimplementasikan hukum internasional. Pada satu sisi, AS mengutuk dan memberikan sanksi ekonomi kepada negara-negara yang pemerintahnya melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia rakyatnya, misalnya kepada Korea Utara.³⁶ AS bahkan mengirimkan pasukan militernya ke negara-negara yang tingkat pelanggaran hak asasi manusianya sudah tidak bisa ditoleransi, misalnya ketika AS mengirimkan pasukannya ke Irak untuk menangkap Saddam Hussein yang dianggap sebagai diktator kejam. Begitu juga ketika AS turut berpartisipasi dalam serangan ke Libya untuk menghentikan Qaddafi.³⁷ Pada sisi lain, AS sendiri melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia terhadap beratus-ratus orang yang telah ditahan dan disiksa di Guantanamo Bay dan kini melalui penggunaan UAV di Pakistan.

Tiap negara akan selalu memprioritaskan keselamatan dan kepentingan negaranya bahkan apabila terkadang hal ini berarti mengabaikan norma yang ada. Hal inilah yang "menahan" negara-negara lain dari mengkritik standar ganda AS dalam bidang kemanusiaan ini. Negara hegemon yang seyogyanya merupakan negara yang memiliki *power* paling besar akan memiliki legitimasi lebih tinggi dalam melanggar hukum internasional yang berlaku. Sifat dasar sistem internasional adalah anarki, yaitu tidak ada pemerintah atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada negara. Hal ini berimplikasi pada minimnya protes kepada negara yang hegemon apabila ia melanggar suatu peraturan yang ada. Akar dari teori ini berasal dari Thucydides yang menyatakan bahwa "*the strong do what they have the power to do, and the weak accept what they have to accept,*"³⁸ yang menunjukkan bahwa semakin besar *power* yang dimiliki suatu negara, terutama negara hegemon, semakin banyak opsi yang dapat dipilihnya dalam menentukan keputusan yang berhubungan dengan negara lain. AS merupakan negara hegemon sehingga secara logis tidak ada negara lain di dunia yang akan ingin dengan sengaja membuat masalah atau menyulut konflik dengan AS. Hal inilah yang

menyebabkan kritik keras terhadap penggunaan UAV jarang muncul dari pemerintah negara lain dan walaupun ada yang menunjukkan protes secara publik dampaknya kepada keputusan AS tidak signifikan.

Situasi yang berbeda akan dihadapi negara yang bukan hegemon. Apabila yang menggunakan UAV dan membunuh masyarakat sipil bukanlah AS pasti sudah terjadi reaksi internasional yang sangat besar menentang hal tersebut karena dianggap melanggar hak asasi manusia dan negara yang menggunakan UAV tersebut akan terpaksa mendengarkan tekanan internasional. Masyarakat internasional juga bisa mengancam akan memberikan embargo atau sanksi ekonomi lainnya yang mempersulit negara tersebut untuk menghentikan serangan UAV-nya di negara lain. Inilah mengapa dukungan dari masyarakat internasional sangatlah penting apabila suatu negara ingin melakukan *extrajudicial killing* di wilayah negara lain. Namun, AS mendapatkan pengecualian dari hal tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam konteks UAV AS, dukungan dari pihak internasional bukanlah faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan taktik tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, ditemukan beberapa hal penting terkait dengan efektivitas UAV sebagai bagian dari *extrajudicial killing*. Untuk variabel pertama, yaitu bentuk organisasi yang menjadi target UAV, dapat dilihat bagaimana Al Qaeda dan Taliban mengalami perubahan struktur kepemimpinan, yang tadinya hirarkis menjadi lebih ke arah jejaring. Hal ini berbeda dengan yang pada awalnya diprediksikan oleh AS yang mengasumsikan kelompok-kelompok teror memiliki sistem sentralisasi kepemimpinan. Dapat dilihat pula bagaimana apabila satu individu yang memiliki posisi tertentu di organisasi, misalnya orang nomor dua atau ahli strategi Al Qaeda, diserang dan tewas karena UAV akan selalu ada orang lain yang bisa menggantikan tanpa adanya kesulitan tertentu. Di samping itu, baik Al Qaeda maupun Taliban menggunakan ideologi Islam sebagai basis perekrutan dan perjuangan kelompok sehingga efek *deterrence* untuk menghancurkan semangat tempur para anggota kelompok teror tidak bisa tercapai dengan menggunakan UAV. Para anggota kelompok teror akan tetap percaya bahwa bentuk perjuangan melawan AS dilakukan demi agama dan doktrin yang demikian sulit untuk dihilangkan terlepas dari kerugian yang terjadi di lapangan.

Perlu diingat bahwa *extrajudicial killing* secara esensi merupakan suatu taktik yang pelaksanaannya kontroversial dan sifatnya sensitif kepada kedaulatan negara tempat digunakannya taktik tersebut. Untuk bisa menggunakan taktik *extrajudicial killing* secara efektif diperlukan adanya variabel kedua, yaitu prosedur dan informasi intelijen yang kredibel. Dari penelitian ini ditemukan bahwa muncul banyak sekali pertanyaan mengenai proses pemilihan siapa saja yang akan menjadi target serangan UAV AS.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bagaimana AS tidak begitu memiliki isu dalam melakukan 3 proses pertama, yaitu dalam merencanakan dan mengarahkan, mengumpulkan, serta memproses. Namun, pada proses produksi dan analisis ditemukan masalah. Legalitas penggunaan UAV menjadi dipertanyakan karena AS menggunakan metode yang dikenal dengan nama *signature strike* dalam menggunakan UAV, yaitu memilih calon target berdasarkan pola perilaku dan interaksinya sehari-hari dimana observasi yang dilakukan tidak pernah diketahui oleh entitas lain selain internal CIA dan militer AS. *Signature strike* ini jelas bertentangan dengan *Geneva Convention* yang bertujuan melindungi masyarakat sipil apabila perang terjadi. Kebenaran masalah ini dipertegas dengan kenyataan bahwa AS tidak bisa menunjukkan adanya proses peradilan yang jelas sebelum serangan UAV dilakukan di Pakistan. Asosiasi pola perilaku dan interaksi dianggap tidak cukup untuk menjustifikasi apakah para target serangan UAV memang pantas untuk dibunuh, terlebih ketika data statistik yang dikumpulkan dari lapangan menunjukkan bagaimana banyak korban serangan yang terdiri dari masyarakat sipil dan anak-anak.

Sementara itu, diseminasi pada *intelligence cycle* yang dilakukan dalam konteks UAV implementasinya berbeda apabila dibandingkan dengan kasus lain dalam kontra-terorisme. Biasanya, informasi yang telah melewati berbagai proses diberikan kepada pembuat kebijakan, yaitu Presiden. Namun, khusus dalam UAV di Pakistan, Direktur CIA menjadi pihak yang menentukan siapa saja yang bisa diserang berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan tersebut. Dengan kata lain, pihak yang mengumpulkan informasi dan pembuat keputusan merupakan instansi yang sama, yaitu CIA. Hal ini menjadi isu tersendiri karena CIA bukanlah bagian dari militer yang terikat kepada konvensi-konvensi internasional mengenai pelaksanaan perang. Penggunaan UAV di Pakistan dianggap telah menyalahi *Geneva Convention* yang sudah diratifikasi AS sehingga membuat prosedur pembuatan keputusan tidak kredibel. Adanya berbagai pelanggaran atas hak asasi manusia dan konvensi internasional ini

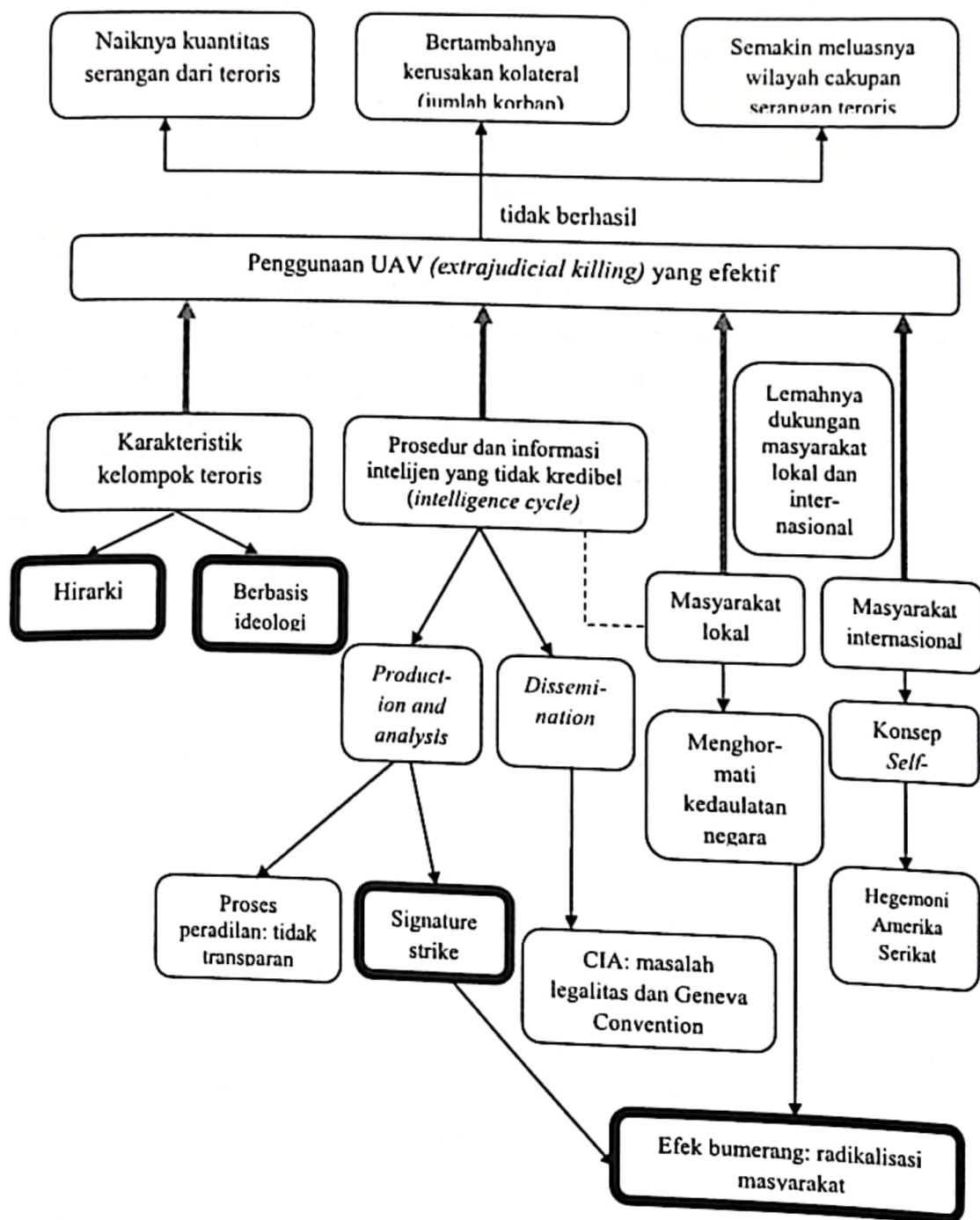
berujung kepada efek bumerang kontra-terorisme yang berbentuk radikalisasi. Dengan digunakannya *signature strike* kelompok teror akan lebih mudah melakukan propaganda anti-Amerika kepada masyarakat sipil. Padahal, rekrutmen anggota baru merupakan suatu hal yang fundamental dalam berlangsungnya kehidupan kelompok teroris seharusnya upaya kontra-terorisme berupaya untuk mempersulit proses rekrutmen tersebut. Penjelasan mengenai radikalisasi ini juga berhubungan erat dengan variabel ketiga yaitu pentingnya dukungan masyarakat lokal.

Variabel terakhir yang diobservasi dalam penelitian ini adalah bagaimana AS perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat lokal dan internasional dalam menggunakan UAV di Pakistan. Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat lokal, AS idealnya berkoordinasi dengan pemerintah Pakistan dalam memformulasikan kebijakan kontra-terorisme yang bisa dilakukan di negara tersebut. Namun, penggunaan UAV di Pakistan, baik kapan, dimana, dan siapa target serangan yang akan dilakukan, tidak pernah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Pakistan. Masyarakat melihat hal ini sebagai intervensi dari AS dimana pemerintah Pakistan bertindak sebagai negara boneka. Dalam kondisi ini, masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah Pakistan dan lebih mungkin menerima propaganda bahwa AS membenci masyarakat Islam secara umum dan perlu dilawan. Hal ini juga akan berujung kepada radikalisasi masyarakat sipil. Tanpa adanya dukungan masyarakat lokal, akan sulit bagi AS untuk melawan kelompok teror karena rekrutmen anggota dari masyarakat merupakan strategi utama yang menunjang kehidupan kelompok teror tersebut. Selain itu, masyarakat sipil juga dibutuhkan dukungannya untuk melaporkan apabila ada kegiatan yang mencurigakan di lingkungannya. Hal ini penting karena anggota kelompok teror sering kali berbaur dalam masyarakat sehingga adanya masyarakat yang awas dapat memberikan bantuan yang besar dalam upaya kontra-terorisme.

Dukungan masyarakat internasional juga merupakan salah satu faktor yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan *extrajudicial killing* menggunakan UAV. Dukungan ini dapat digunakan bagi negara untuk memastikan keberlanjutan taktik *extrajudicial killing* itu sendiri dan juga untuk berbagai upaya kontra-terorisme lainnya. Namun, hal ini tidak terjadi dalam konteks penggunaan UAV oleh AS. Berbeda dengan negara lainnya, AS merupakan salah satu negara terkuat di dunia dengan kapasitas militer jauh di atas negara lainnya. Sebagai negara yang signifikan dalam perpolitikan dunia, AS tidak perlu benar-benar mengikuti apa yang dikatakan

masyarakat dunia. AS masih menjadi negara yang akan dianggap penting oleh negara lainnya dengan ekonomi yang sangat tinggi dan berbagai bantuan finansial yang diberikannya. Oleh karena itu, dukungan masyarakat internasional berkontribusi sangat minim dalam ketidakberhasilan taktik *extrajudicial killing* AS menggunakan UAV di Pakistan.

Gambar 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas serangan UAV di Pakistan



Oleh karena itu, berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel, yaitu: (1) karakteristik kelompok teroris telah berubah menjadi lebih ke arah jejaring daripada hirarkis, (2) prosedur yang dilakukan tidak kredibel karena menggunakan *signature strike* pada proses memproduksi dan menganalisis, dan (3) tidak adanya dukungan dari masyarakat lokal, berkontribusi kepada kegagalan penggunaan UAV AS di Pakistan.

Saran yang dihasilkan dari penelitian ini adalah karena pendekatan *direct strategy* dengan koersi tidak berhasil, AS perlu menggunakan strategi *indirect approach* dengan lebih efektif sebagai salah satu bagian utama dalam upaya kontra-terorisemenya. Melalui *indirect approach*, kelompok teror bisa dikurangi kemampuannya dalam melakukan perekrutan dan baik Pakistan dan AS bisa mendiskreditkan para kelompok ini di mata publik. Pergerakan militer dalam kontra-terorisme di negara lain tentunya masih bisa menggunakan strategi militer, namun dalam implementasinya dibutuhkan kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat lokal untuk memastikan kredibilitas prosedur yang dilaksanakan. Adanya *indirect approach* dalam bentuk memberikan bantuan ekonomi dan pendidikan juga akan meminimalkan adanya rasa permusuhan dari masyarakat Pakistan kepada AS.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, sebagai negara yang juga digunakan sebagai daerah operasi beberapa kelompok teror ada beberapa pembelajaran yang bisa diambil Indonesia. Pertama, dengan tidak berhasilnya penggunaan UAV di Pakistan, dapat dilihat bahwa *direct approach* dalam kontra-terorisme tidak bisa menjadi satu-satunya opsi. Dalam menghadapi kelompok teror, Indonesia perlu berupaya untuk mendiskreditkan kelompok teror agar mereka tidak bisa lagi melakukan rekrutmen anggota. Pelajaran kedua yang bisa dipetik adalah mengenai kedaulatan negara dalam pembuatan kebijakan kontra-terorisme. Indonesia harus memastikan adanya kontrol penuh terhadap kebijakan-kebijakan di negaranya. Walaupun memiliki berbagai kerjasama dengan negara lain, pemerintah Indonesia harus tetap memiliki hak untuk menentukan kebijakan-kebijakan apa saja yang dilaksanakan.

Hal terakhir yang bisa diambil sebagai pembelajaran dari penelitian ini untuk Indonesia adalah mengenai UAV sebagai teknologi mutakhir. Sebagai negara yang memiliki wilayah yang luas, Indonesia bisa mulai memikirkan prospek penggunaan UAV untuk mengawasi perbatasan Indonesia yang sangat luas tersebut, yang saat ini sering dilanggar oleh berbagai pihak asing. Di samping itu, UAV juga bisa digunakan

untuk mengumpulkan informasi intelijen dari udara untuk kepentingan kontra-terorisme. UAV bisa menjadi taktik yang efektif dalam kontra-terorisme Indonesia, selama tidak digunakan untuk kepentingan ofensif dan melakukan penyerangan.

Daftar Pustaka

- Amnesty International. *Will I be Next: US Drone Strikes in Pakistan*. Amnesty International Publications, 2013.
- BBC. "Mapping US drone and Islamic militant attacks in Pakistan," diakses 6 September 2013, <http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-10648909>
- Boyle, Michael J. "The Costs and Consequences of Drone Warfare," *International Affairs*, Vol. 89, No. 1, 2013, hlm. 1-29.
- Bureau of Counterterrorism. *Country Reports on Terrorism 2013: Executive Summary*. United States Department of State Publication, 2014.
- Byman, Daniel. "Why Drones Work: the Case for Washington's Weapon of Choice," *Foreign Affairs*, 2013, hlm. 32-43.
- . "Do Targeted Killings Work?" *Foreign Affairs*, Vol. 85, No. 2, 2006, hlm. 95-111.
- Calabresi, Massimo. "Why the U.S. Went to War: Inside the White House Debate on Libya," *TIME*, 20 Maret 2011. <http://swampland.time.com/2011/03/20/why-the-u-s-went-to-war-inside-the-white-house-debate-on-libya/>
- Carter, D.L. *Law Enforcement Intelligence: A Guide for State, Local, and Tribal Law Enforcement Agencies*. US Department of Justice, 2004.
- CIA. *Fact Book on Intelligence*. Washington DC: CIA Office of Public Affairs, 1983.
- Council on Foreign Relations. "Backgrounder: al-Qaeda (a.k.a. al-Qaida, al-Qa'ida)," dalam <http://www.cfr.org/terrorist-organizations-and-networks/al-qaeda-k-al-qaeda-al-qaeda/p9126#p5>. Terakhir dimodifikasi 6 Juni 2012. Diakses 2 Mei 2014.
- Franzen, Simon. *Unity in Terrorism: the relationship between Al-Qaeda, the Taliban and Militants in Pakistan*. Institute for Middle Eastern Democracy, 2012.
- Goerzig, Carolin. "The Boomerang Effect of the War on Terror," *Historia Actual Online*. 2010, hlm. 163-171
- Hulnick, Arthur S. "What's Wrong with the Intelligence Cycle," dalam Loch K. Johnson. *The Intelligence Cycle: the Flow of Secret Information from Overseas to the Highest Councils of Government*. London: Praeger Security International, 2007, hlm. 1-21.
- International Crisis Group. "Drones: Myths and Reality in Pakistan," *Asia Report*. No. 247, 2013.
- Johnston, Patrick. B. "Does Decapitation Work?: Assessing the Effectiveness of Leadership Targeting in Counterinsurgency Campaigns," dalam *International Security*. Vol. 36, No. 4, 2013.
- Miller, Greg. "Plan for Hunting Terrorists Signals U.S. Intends to Keep Adding Names to Kill Lists," *Washington Post*, 24 Oktober 2012. http://www.washingtonpost.com/world/national-security/plan-for-hunting-terrorists-signals-us-intends-to-keep-adding-names-to-kill-lists/2012/10/23/4789b2ae-18b3-11e2-a55c-39408fbc6a4b_story.html
- Nye, Joseph. *Understanding International Conflict*. New York: Pearson, 2009.

- Pew Research Center. *Pakistani Public Opinion Ever More Critical of US: 74% Call America an Enemy*. 2012.
- Price, Bryan C. "Targeting Top Terrorists: How Leadership Decapitation Contributes to Counterterrorism," dalam *International Security*. Vol. 36, No.4, 2012, hlm. 9-46.
- Rennack, Dianne E. "North Korea: Legislative Basis for U.S. Economic Sanctions," dalam *Congressional Research Service*. http://assets.opencrs.com/rpts/R41438_20110425.pdf
- Rogers, P. "Terrorism," dalam Paul D. Williams. *Security Study: An Introduction*. London: Routledge, 2008.
- South Asia Terrorism Portal*, "Pakistan Data Sheets," diakses 1 September 2013 <http://www.satp.org/satporgrp/countries/pakistan/database/index.html>
- U.S. Department of Defense. "Introduction to Unmanned Aerial Vehicle," diakses 7 September 2013. <http://www.defense.gov/specials/uav2002/>
- U.S. Department of Defense. *National Strategy for Combating Terrorism*. Washington, D.C., 2003.
- Van Linschoten, Alex Strick dan Felix Kuehn. *Separating the Taliban from al-Qaeda: The Core of Success in Afghanistan*. Center of International Cooperation, 2001.
- Zimmerman, Katherine. "The Al Qaeda Network: a New Framework for Defining the Enemy," *Report by AEI's Critical Threats Project*, 2013.

Catatan Belakang

- ¹ Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Broto Wardoyo yang memberikan begitu banyak masukan yang berharga dalam penelitian ini.
- ² Paul Rogers, "Terrorism," dalam Paul D. Williams, ed., *Security Study: an Introduction*. (London: Routledge, 2008), hlm. 173.
- ³ U.S. Department of Defense. *National Strategy for Combating Terrorism*. Washington, D.C., 2003.
- ⁴ "Introduction to Unmanned Aerial Vehicle," U.S. Department of State, diakses 7 September 2013, <http://www.defense.gov/specials/uav2002/>.
- ⁵ BBC, "Mapping US drone and Islamic militant attacks in Pakistan," 6 September 2013, <http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-10648909>.
- ⁶ "Pakistan Data Sheets," *South Asia Terrorism Portal*, diakses 1 September 2013 <http://www.satp.org/satporgrp/countries/pakistan/database/index.html>
- ⁷ Michael J. Boyle, "The Costs and Consequences of Drone," 3.
- ⁸ Daniel Byman, "Do Targeted Killings Work?," *Foreign Affairs*. Vol. 85, No. 2, 2006, hlm. 100.
- ⁹ Patrick B. Johnston, "Does Decapitation Work?: Assessing the Effectiveness of Leadership Targeting in Counterinsurgency Campaigns," dalam *International Security*, Vol. 36, No. 4, 2012, hlm. 74.
- ¹⁰ Daniel Byman, "Do Targeted Killings Work?," hlm. 107.
- ¹¹ Bryan C. Price, "Targeting Top Terrorists," hlm. 12.
- ¹² Daniel Byman, "Do Targeted Killings Work?," hlm. 98.
- ¹³ *Ibid.*, hlm. 111.
- ¹⁴ Alexander George dan Andrew Bennett, *Case Studies and Theory Development – The Social Sciences*. (Cambridge: MIT Press, 2005), hlm. 181-185.
- ¹⁵ Alex Strick van Linschoten dan Felix Kuehn, *Separating the Taliban from al-Qaeda: The Core of Success in Afghanistan*. (Center of International Cooperation, 2001), hlm. 3.
- ¹⁶ *Ibid.*
- ¹⁷ Rashid, dalam Simon Franzen, *Unity in Terrorism: the relationship between Al-Qaeda, the Taliban and Militants in Pakistan*, (Institute for Middle Eastern Democracy, 2012), hlm. 10.
- ¹⁸ Katherine Zimmerman, "The Al Qaeda Network: a New Framework for Defining the Enemy," *Report by AEI's Critical Threats Project*. (2013), hlm. 8.
- ¹⁹ *Ibid.*
- ²⁰ "Backgrounder: al-Qaeda (a.k.a. al-Qaida, al-Qa'ida)," *Council on Foreign Relations*, diakses 2 Mei 2014, <http://www.cfr.org/terrorist-organizations-and-jejarrings/al-qaeda-k-al-qaida-al-qaida/p9126#p5>

-
- ²¹ Bureau of Counterterrorism, *Country Reports on Terrorism 2013: Executive Summary*. (United States Department of State Publication, 2014), hlm. 4
- ²² *Ibid.*
- ²³ Law Enforcement Intelligence: A Guide for State, Local, and Tribal Law Enforcement Agencies, hlm. 64.
- ²⁴ CIA, *Fact Book on Intelligence*. (Washington DC: CIA Office of Public Affairs, 1983), hlm. 17.
- ²⁵ US Department of Defense, *Introduction of the Unmanned Aerial Vehicle (UAV)*.
- ²⁶ Greg Miller, "Plan for Hunting Terrorists Signals U.S. Intends to Keep Adding Names to Kill Lists," *The Washington Post*. (24 Oktober 2012), diakses 16 Mei 2014, http://www.washingtonpost.com/world/national-security/plan-for-hunting-terrorists-signals-us-intends-to-keep-adding-names-to-kill-lists/2012/10/23/4789b2ac-18b3-11e2-a55c-394081be6a4b_story.html.
- ²⁷ *Ibid.*
- ²⁸ FBI Office Intelligence, dalam D.L. Carter, *Law Enforcement Intelligence: A Guide for State, Local, and Tribal Law Enforcement Agencies*. (US Department of Justice, 2004), hlm. 65.
- ²⁹ Greg Miller, "Plan for Hunting Terrorists."
- ³⁰ "The Intelligence Cycle" (18 June 2013), *Central Intelligence Agency*, diakses 14 Mei 2014 <https://www.cia.gov/library/publications/additional-publications/the-work-of-a-nation/work-of-the-cia.html>.
- ³¹ Carolin Goerzig, "The Boomerang Effect of the War on Terror," *Historia Actual Online*. (2010), hlm. 163-171.
- ³² International Crisis Group, *Drones: Myths and Reality in Pakistan*.
- ³³ Amnesty International, *Will I be Next: US Drone Strikes in Pakistan*. (Amnesty International Publications, 2013), hlm. 13.
- ³⁴ Pew Research Center, *Pakistani Public Opinion Ever More Critical of US: 74% Call America an Enemy*. (2012), hlm. 2.
- ³⁵ *Ibid.*
- ³⁶ Dianne E. Rennack, "North Korea: Legislative Basis for U.S. Economic Sanctions," *Congressional Research Service*, diakses 2 Mei 2014, http://assets.opencrs.com/rpts/R41438_20110425.pdf.
- ³⁷ Massimo Calabresi, "Why the U.S. Went to War: Inside the White House Debate on Libya," *TIME*, diakses 2 Mei 2014, <http://swampland.time.com/2011/03/20/why-the-u-s-went-to-war-inside-the-white-house-debate-on-libya/>.
- ³⁸ Joseph Nye, *Understanding International Conflict*. (New York: Pearson, 2009), hlm. 21.